

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Gaya kepemimpinan pragmatis dan inklusif oleh Pedro Sanchez memperlihatkan perubahan kebijakan luar negeri Spanyol dari *Real Decreto 557/2011* menjadi *Real Decreto 1155/2024* dalam konteks lonjakan migrasi 2015–2025 yang dapat disimpulkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor domestik dan internasional yang saling memperkuat. Secara kausal, perubahan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian kebijakan (*policy obsolescence*) dari kebijakan lama terhadap dinamika migrasi kontemporer. Regulasi tahun 2011 yang berorientasi restriktif dan administratif tidak lagi mampu mengakomodasi peningkatan volume, kompleksitas, serta karakter migrasi pascakrisis Eropa 2015. Lonjakan migrasi yang signifikan ditandai dengan peningkatan *net migration* secara drastik pada tahun 2018 menjadi tekanan struktural utama yang memaksa Spanyol melakukan penyesuaian kebijakan secara fundamental.

Dari perspektif domestik, perubahan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, transformasi kepemimpinan politik, khususnya peralihan dari pendekatan konservatif di bawah Mariano Rajoy menuju pendekatan yang lebih inklusif oleh Pedro Sánchez, yang memandang migrasi sebagai peluang ekonomi dan sosial. Kedua, dinamika opini publik dan polarisasi politik, di mana isu migrasi berkembang menjadi agenda strategis nasional seiring meningkatnya sentimen anti-imigran serta kompetisi politik antara *Vox* dan PSOE. Ketiga, peran media massa *El País* dalam membingkai migrasi sebagai isu kemanusiaan sekaligus

keamanan, yang memperkuat urgensi reformasi kebijakan. Keempat, dorongan dari kelompok kepentingan ekonomi dan tenaga kerja, seperti CEOE dan CCOO, yang melihat migrasi sebagai solusi atas kekurangan tenaga kerja sekaligus menekankan perlindungan hak pekerja migran. Sementara itu, dari perspektif internasional, perubahan kebijakan turut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pergeseran posisi Spanyol dalam sistem migrasi global dari negara sekunder menjadi salah satu negara *frontline* di Eropa. Kedua, tekanan institusional UE melalui kerangka CEAS dan *New Pact on Migration and Asylum* yang mendorong harmonisasi kebijakan nasional dengan standar regional melalui standar *EU Directives*. Ketiga, kewajiban solidaritas internasional, seperti prinsip *non-refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951, yang menuntut perlindungan terhadap migran dan pencari suaka. Keempat, dinamika hubungan bilateral serta keterlibatan aktor non-negara seperti aksi terorisme ISIS, termasuk peran negara transit seperti Maroko dan bagaimana solusi dalam penanganan krisis perbatasan Ceuta pada tahun 2021. Dinamika yang terjadi pada saat kepemimpinan Pedro Sanchez dalam faktor-faktor yang telah disebutkan dipandang sebagai *window of opportunity* yang dilakukan dan diimplementasikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez melalui perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Spanyol, *Real Decreto 557/2011* menjadi *Real Decreto 1155/2024*.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka peluang bagi pengembangan kajian di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis tidak hanya pada level kebijakan formal, tetapi juga pada tahap implementasi kebijakan migrasi di tingkat

lokal, seperti di wilayah perbatasan Ceuta, Melilla, maupun Kepulauan Canary. Pendekatan ini penting untuk melihat sejauh mana efektivitas *Real Decreto 1155/2024* dalam menjawab tantangan empiris di lapangan, khususnya terkait integrasi sosial dan kapasitas institusional dalam menangani arus migran. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan perspektif komparatif dengan membandingkan kebijakan migrasi Spanyol dengan negara *frontliner* lain di UE, seperti Italia atau Yunani. Perbandingan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi respons kebijakan dalam menghadapi tekanan migrasi, sekaligus mengidentifikasi pola harmonisasi dalam kerangka kebijakan regional UE. Penggunaan data primer melalui wawancara dengan aktor terkait, seperti pembuat kebijakan, organisasi internasional, maupun kelompok advokasi migran, dapat menjadi tambahan penting untuk meningkatkan validitas penelitian. Hal ini akan membantu menggali perspektif yang lebih kontekstual mengenai proses pengambilan keputusan serta dinamika implementasi kebijakan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen resmi.